

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru tidak memberi contoh seperti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukannya. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan atau penganiayaan.

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 paragraph 3, third amendment. In the explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the State government system, it is stated that "the Indonesian State is based on law (Rechtsstaat), not based on mere power (Machtsstaat)". The issue raised was what was the basis for the judge's legal considerations in handing down verdict Number: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the case of the crime of abuse in the jurisdiction of the Jambi District Court, whether the verdict handed down in the case of the crime of abuse in the Jambi District Court had a deterrent effect and reflected justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on the considerations in the elements in Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed the criminal act of torture as charged by the public prosecutor in a single indictment, and because no excuse has been found which eliminates the illegality and justification which eliminates the defendant's guilt, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions which are threatened according to Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. (KUHP) is threatened with imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months in prison. However, in this case the defendant was sentenced to 4 (four) months in prison. The sentence handed down was still too light considering that the defendant was a member of the National Police who did not provide an example such as having committed a criminal act of abuse which resulted in the victim witness feeling sick and traumatized by the violence he committed. So the judge's verdict of only 4 (four) months in prison was deemed not to reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is that harmony in the household is maintained when conflict occurs, the husband and wife should communicate well, in communicating between husband and wife the need for self-control in the sense of maintaining calm attitudes, words and emotions to avoid acts of beatings or abuse.

Keywords: *Analysis of Judges' Considerations, Sentencing Against Perpetrators of Criminal Persecution*